

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islamofobia merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi beberapa tahun belakangan, baik di level domestik maupun internasional. Salah satu fenomena mulai berkembangnya islamofobia dan istilahnya sendiri adalah Serangan 11 September yang terjadi di Amerika Serikat tepat pada 11 September 2001.<sup>1</sup> Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok radikal<sup>2</sup> Islam Al-Qaeda telah membangkitkan ketakutan terhadap Islam di dunia Barat karena Islam dianggap sebagai agama yang melahirkan teroris<sup>3</sup>, bahkan gelombang kebencian dan ketakutan ini telah menyebar ke seluruh dunia.<sup>4</sup>

Berdasarkan jejaknya, istilah islamofobia mulai berkembang menjadi pembahasan sejak akhir 1990-an, yaitu ketika publikasi yang berjudul *Islamophobia: A Challenge for Us All* dikeluarkan oleh Runnymede Trust, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada kesetaraan ras yang berlokasi di Inggris.<sup>5</sup> Sejak publikasi ini dikeluarkan, istilah islamofobia mulai banyak digunakan oleh khalayak dari berbagai kalangan, baik di Inggris, Prancis, hingga Amerika Serikat. José Pedro Zúquete dalam tulisannya, mendefinisikan islamofobia sebagai stigma dan pola pikir yang berkaitan dengan adanya rasa takut

---

<sup>1</sup> Syed Attique et al., "Islamophobia in the West and Post 9/11 Era," *International Affairs and Global Strategy* 78 (2019): 23–24.

<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal merupakan tindakan yang dilakukan secara keras untuk menuntut perubahan.

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teroris merupakan orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dengan membawa tujuan politik.

<sup>4</sup> Syed Attique et al., "Islamophobia in the West and Post 9/11 Era," 24-25.

<sup>5</sup> Erik Bleich, "Defining and Researching Islamophobia," *Review of Middle East Studies* 46, no. 2 (2012): 180.

terhadap muslim dan agama Islam karena adanya generalisasi bahwa Islam adalah ancaman yang berbahaya dan pantas untuk dimusuhi bagi orang Barat.<sup>6</sup> Definisi yang diberikan oleh Zúquete memperlihatkan bagaimana dari tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dapat berdampak besar terhadap bagaimana Islam dipandang oleh masyarakat luas.

Dalam membendung pengaruh dari tindakan radikal serupa dari sebuah agama yang dapat berdampak pada pemerintahan, negara-negara Eropa telah lebih dahulu memikirkan tentang ketakutan ini. Berdasarkan sejarahnya, Eropa pada abad pertengahan pernah berada di dalam genggaman kekuasaan Gereja Katolik yang berasal dari peninggalan Kekaisaran Romawi. Gereja memiliki kendali yang cukup besar terhadap pemerintahan di negara-negara Eropa, termasuk dalam memberikan pengaruh politik.<sup>7</sup> Hal inilah yang kemudian membuat adanya trauma masa lalu bagi Bangsa Eropa sehingga nilai-nilai sekularisme<sup>8</sup> pun diterapkan untuk memisahkan gereja (agama) dengan pemerintahan.

Salah satu negara Eropa yang telah menerapkan sekularisme di negaranya adalah Prancis. Perubahan ini dimulai pada tahun 1905, ketika Pemerintah Prancis memutuskan untuk mengurangi pengaruh dari gereja terhadap pemerintahan negara dengan memperkenalkan Prancis sebagai negara penganut ideologi *laïcité* atau sekularisme melalui undang-undang Prancis terhadap Pemisahan Gereja dan Negara pada 9 Desember 1905 (*loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation*

---

<sup>6</sup> José Pedro Zúquete, "The European Extreme-Right and Islam: New Directions?," *Journal of Political Ideologies* 13, no. 3 (2008): 321–344.

<sup>7</sup> Jonas Wanstok, "Islamophobia in France: A Discursive Shift" (1905): 1–3.

<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme merupakan suatu paham yang menolak adanya paham agama di dalam urusan politik, publik, dan pemerintahan.

*des Églises et de l'État*)<sup>9</sup>. *Laïcité* di sini tidak hanya ditetapkan untuk mengurangi pengaruh agama (gereja), melainkan *laïcité* juga memberikan aturan terkait atribut keagamaan yang digunakan oleh individu dengan artian bahwa agama bersifat privat sehingga hal tersebut tidak perlu diketahui oleh orang lain.<sup>10</sup>

*Laïcité* telah mendarah daging sebagai identitas Prancis. Bahkan dalam pemilihan Presiden Prancis ke-25 pada tahun 2017 lalu, *laïcité* diangkat sebagai wacana kuat dalam pemilu antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen untuk merebut suara.<sup>11</sup> Pada kampanye yang dilakukan kedua calon, pembahasan terkait *laïcité* sebagai identitas nasional Prancis, dan bagaimana pandangan kedua calon terhadap keberadaan muslim di Prancis juga disuarakan. Le Pen yang berasal dari sayap kanan ekstrem Prancis, kontra dengan hal tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan di sisi lain, Macron yang mengakui dirinya sebagai liberalis, tidak mempermasalahkan keberadaan muslim di Prancis dan justru mendukung keberadaan mereka.<sup>13</sup>

Pada kampanyenya bersama *La République En Marche!* di tahun 2016, Macron memberikan pernyataan, “*No religion is a problem in France today*”, ia kemudian memberikan pernyataan lanjutan terkait sekularisme di Prancis, “*If the state should be neutral, which is at the heart of secularism, we have a duty to let*

---

<sup>9</sup> Blandine Chelini-Pont and Nassima Ferchiche, “Religion and the Secular State: French Report,” *Aix-Marseille Université* (2015).

<sup>10</sup> Raphael Cohen-Almagor, *Indivisibilité, Sécurité, Laïcité: The French Ban on the Burqa and the Niqab, French Politics* (Palgrave Macmillan UK, 2022), 8.

<sup>11</sup> Aprilia Firmonasari, Wening Udasmoro, and Yohanes Tri Mastoyo, “Understanding Secularism and National Identity in French Political Discourses,” *Jurnal Humaniora* 32, no. 2 (2020): 136.

<sup>12</sup> Elaine Ganley, “Le Pen’s Far-Right Vision: Retooling France at Home, Abroad,” *AP News*, terakhir diubah pada 22 April 2022, diakses pada 2 Juli 2023, <https://apnews.com/article/2022-french-election-marine-le-pen-vision-1dc32d753e839a2c1871db3bb47a3e2f>.

<sup>13</sup> Charles Barthold and Martin Fougère, “How You Can Tell Emmanuel Macron Is Actually a Populist – and Why It Matters,” *The Conversation*, terakhir diubah pada 5 Maret 2020, diakses pada 2 Juli 2023, <http://theconversation.com/how-you-can-tell-emmanuel-macron-is-actually-a-populist-and-why-it-matters-130496>.

*everybody practice their religion with dignity*".<sup>14</sup> Dari pernyataan tersebut, Macron terlihat memberikan dukungan terhadap keberadaan Islam di Prancis. Ia juga menekankan tentang kebebasan masyarakat dalam praktik keagamaan dan berjanji untuk memperbaiki citra muslim di Prancis yang sering dikaitkan dengan terorisme<sup>15</sup>. Dari sini pula ia memperjelas perbedaan posisi antara dirinya dengan Le Pen dalam kampanye yang dilakukan. Dalam pemilu ini, Macron berhasil menang telak atas Le Pen dengan selisih suara yang cukup besar, yaitu 66,05% dengan 33,94%.<sup>16</sup> Hal ini mengakhiri pemilihan Presiden Prancis dengan Macron yang keluar sebagai Presiden baru dari negara sekular ini.

Sayangnya, dalam masa jabatannya, respons Macron terhadap serangkaian insiden yang terjadi pada tahun ketika ia mulai menjabat sebagai Presiden Prancis terbilang cukup mengecewakan muslim di Prancis karena tidak sejalan dengan apa yang dijanjikan pada masa pemilu. Dari tahun 2017 hingga 2020, terjadi beberapa rentetan serangan teroris seperti *Champs-Élysées attack* pada 20 April 2017 yang setidaknya terdapat 2 korban, *Carcassonne and Trèbes attack* pada 23 Maret 2018 dengan 5 korban, *Strasbourg attack* pada 11 Desember 2018 dengan 6 korban, *Paris police headquarters stabbing* pada 3 Oktober 2019 dengan 5 korban, dan puncaknya pada 16 Oktober 2020, ketika Samuel Paty, seorang guru di Prancis dibunuh secara sadis oleh Abdoullakh Anzorov dengan kepala yang dipenggal. Pembunuhan Paty dilakukan karena beredarnya informasi bahwa Paty telah

---

<sup>14</sup> Jakob Hanke Vela, "Emmanuel Macron: 'No Religion Is a Problem in France,'" *POLITICO*, terakhir diubah pada 2016, diakses pada 1 Maret 2023, <https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-muslim-islam-no-religion-problem-in-france/>.

<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme merupakan penggunaan kekerasan yang memunculkan rasa takut dengan maksud untuk mencapai tujuan (biasanya tujuan politik).

<sup>16</sup> BBC News, "Emmanuel Macron Defeats Le Pen to Become French President," *BBC News*, terakhir diubah pada 8 Mei 2017, diakses pada 1 Maret 2023, <https://www.bbc.com/news/world-europe-39839349>.



menunjukkan sebuah karikatur Nabi Muhammad yang bersumber dari majalah satir yang cukup terkenal di Prancis, yaitu Charlie Hebdo, ketika Paty sedang memperkenalkan kebebasan berekspresi kepada murid-muridnya.<sup>17</sup>

Dalam merespons hal ini, Emmanuel Macron dalam pidatonya mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan melawan terorisme dan radikalisme<sup>18</sup> Islam. Menurutnya, tragedi tersebut telah memperlihatkan Paty sebagai wajah dari Prancis. Paty tewas sebagai seorang guru yang berjuang untuk mewujudkan kelahiran kembali Prancis sebagai negara sekuler dengan mengajarkan tentang nilai-nilai kebebasan berekspresi. Macron kemudian menyatakan, “*Samuel Paty got killed because the Islamists want our future, and they know that silent heroes like him, they will never have it*”.<sup>19</sup> Pernyataan ini cukup menyinggung muslim di Prancis, terlebih lagi dalam pidatonya beberapa minggu sebelumnya, Macron menggambarkan Islam sebagai “*a religion that is in crisis all over the world today*”, ketika sedang membahas mengenai situasi Prancis di tengah rentetan serangan teroris.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Bahar MAKOOI, “‘The Violence Shook Me Profoundly’: Teachers, Students Remember Samuel Paty’s Murder,” *France 24*, terakhir diubah pada 15 Oktober 2021, diakses pada 26 Oktober 2022, <https://www.france24.com/en/france/20211015-the-violence-shook-me-profoundly-teachers-students-remember-samuel-paty-s-murder>.

<sup>18</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan sosial dan politik yang dilakukan dengan cara kekerasan atau drastis.

<sup>19</sup> Ryan Fahey, “‘France Will Not Give up Cartoons’: Defiant Macron Makes a Passionate Defence of Freedom of Speech at Memorial for Teacher Samuel Paty Who Was Beheaded by Islamic Terrorist for Showing Charlie Hebdo Cartoon,” *Daily Mail Online*, terakhir diubah pada 21 Oktober 2020, diakses pada 18 Agustus 2023, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8865237/President-Macron-pays-respects-coffin-beheaded-teacher-Samuel-Paty.html>.

<sup>20</sup> France 24, “Macron Outlines Plan to Fight ‘Islamist Separatism’ in France,” *France 24*, terakhir diubah pada 2 Oktober 2020, diakses pada 26 Oktober 2022, <https://www.france24.com/en/20201002-live-macron-outlines-proposal-for-law-to-fight-separatism-in-france>.

Prancis di bawah Pemerintahan Macron, akhirnya mengeluarkan France Anti-Separatism Bill untuk melawan terorisme dan separatisme<sup>21</sup> Islam yang didasarkan pada ideologi *laïcité* yang telah menjadi prinsip hukum Prancis sebagai negara penganut sekularisme. Tindakan yang diambil oleh Macron ini dianggap menyudutkan muslim, bahkan sangat bertentangan dengan pernyataannya pada kampanye di tahun 2016 lalu. Macron dalam pidatonya memberikan narasi yang begitu sensitif sehingga memunculkan asumsi dalam muslim bahwa Macron adalah seorang islamofobia.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan mengenai keterkaitan Macron dan muslim, dan adanya skeptis bahwa Macron melihat muslim sebagai ancaman menjadi menarik untuk diteliti. Saat masa kampanyenya, Macron menyuarakan pernyataan yang begitu mendukung muslim dan ia mencoba untuk menghapus citra buruk bahwa muslim di Prancis yang berkaitan dengan terorisme. Pada kenyataannya, ketika Prancis diserang dengan rentetan insiden radikalisme dan terorisme, Macron tentunya mengutuk keras insiden-insiden tersebut hingga membuat regulasi baru untuk memperkuat nilai *laïcité* sebagai prinsip hukum dan dasar negara Prancis. Akan tetapi hal tersebut diikuti dengan narasi yang bertentangan dengan apa yang ia sampaikan pada kampanye sebelumnya. Hal ini memunculkan adanya asumsi dan indikasi bahwa Macron memiliki persepsi ancaman terhadap muslim di Prancis.

---

<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri, atau bahkan mendirikan negara sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tindakan yang dilakukan Macron dalam merespons insiden radikalisme dan terorisme di Prancis yang dilakukan oleh individu dan kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam memunculkan adanya indikasi bahwa Macron memiliki persepsi ancaman terhadap muslim. Penguatan regulasi Prancis dalam France Anti-Separatism Bill oleh Macron terkait *laïcité* sebagai prinsip hukum dan dasar negara Prancis dengan adanya poin-poin yang bertujuan untuk melawan separatisme Islam juga memperkuat indikasi tersebut. Keputusan dan pernyataan Macron terkait insiden yang terjadi di Prancis menunjukkan adanya nilai-nilai yang dipegang teguh dan sudah tertanam sejak lama. Oleh sebab itu, melihat persepsi ancaman Macron terhadap muslim di Prancis adalah hal yang menarik untuk diteliti.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dapat ditarik adalah bagaimana persepsi ancaman Emmanuel Macron terhadap muslim di Prancis (2017-2022)?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi ancaman Emmanuel Macron terhadap muslim di Prancis pada tahun 2017-2022.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dengan permasalahan yang sama, dan juga sebagai pemantik bagi para pembaca dalam menentukan topik penelitian.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis lebih jauh terkait penelitian ini, penulis telah mengumpulkan banyak informasi relevan yang mana terdapat lima karya tulis ilmiah sebagai sumber utama yang penulis jadikan rujukan dalam menjawab pertanyaan yang ada pada penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis ilmiah tersebut penulis jabarkan di bawah ini.

Pertama, penulis merujuk pada tulisan yang berjudul *Constructions and uses of laïcité (French secularism) in French public discourses* yang ditulis Jeanne Prades. Tulisan ini menjelaskan bagaimana awal mula ditetapkan dan digunakannya *laïcité* sebagai prinsip hukum dan identitas nasional sekularisme Prancis yang dipelopori oleh para elite politik yang ada pada masa itu. Dalam proses penerapannya, *laïcité* mengalami banyak perubahan yang mana diakibatkan oleh adanya perbedaan arah politik dari para pemimpin Prancis.<sup>22</sup> Perbedaan ini terjadi tentunya karena pengaruh perbedaan kepentingan dari elite politik sayap kanan dan

---

<sup>22</sup> Jeanne Prades, "Constructions and Uses of Laïcité (French Secularism) in French Public Discourses," *Mathematical Population Studies* 27, no. 2 (2020): 2–3.



sayap kiri. Sebagai hasilnya, penelitian ini memperlihatkan bagaimana terlepas dari pengaruh arah politik yang ada, *laïcité* telah mengalami perubahan yang begitu pesat. Ideologi yang pada awalnya diterapkan dalam rangka membendung pengaruh Gereja di Prancis, kini justru lebih ditingkatkan, bahkan *laïcité* dianggap sebagai tameng dan keamanan Prancis untuk melawan radikalisme dan separatisme Islam.

Tulisan ini layak menjadi referensi bagi penulis dalam melihat bagaimana sejarah awal kemunculan *laïcité* yang sudah diperkenalkan dalam pemerintahan Prancis lebih dari satu abad yang lalu. Dengan melihat kembali ke belakang, tepatnya sejarah dari *laïcité*, penulis dapat mengetahui bagaimana awal mula lahir dan diterapkannya *laïcité* dalam Pemerintahan Prancis hingga berkembang menjadi sebuah ideologi dan landasan negara yang dipegang teguh oleh Prancis hingga saat ini.

Kedua, penulis merujuk pada tulisan yang berjudul *Understanding Secularism and National Identity in French Political Discourses* yang ditulis oleh Aprillia Firmonasari, Wening Udasmoro, dan Yohanes Tri Mastoyo. Tulisan ini menjelaskan bagaimana *laïcité* menjadi wacana kuat yang diangkat dalam proses pemilihan Presiden Prancis ke-25 pada tahun 2017 lalu. Emmanuel Macron yang disokong oleh La République en Marche (LaRem) yang merupakan partai politik di Prancis yang berhaluan liberal, bersaing dengan Marine Le Pen yang berasal dari Front National (FN) atau yang dikenal sebagai partai sayap kanan ekstrem di Prancis. Keduanya menjadi kandidat calon presiden dalam Pemilu Prancis tahun 2017. Perbedaan mendasar dari partai yang menyokong kedua kandidat, tentunya

membuat mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap *laïcité* yang menjadi cukup penting karena merupakan identitas nasional dari Prancis.<sup>23</sup>

Hasil yang ditemukan adalah Le Pen lebih menekankan tentang keberadaan *laïcité* yang dianggap sedang terancam akibat adanya gelombang imigran, terutama imigran muslim yang baginya merupakan ancaman dan masih berkaitan dengan isu terorisme yang ada di Prancis. Le Pen juga menjelaskan bahwa tidak hanya kehadiran para imigran, tetapi muslim yang secara resmi telah menjadi warga negara Prancis, juga merupakan ancaman terhadap identitas nasional Prancis yang bertanggung jawab atas isu terorisme, imigran, dan bahkan masalah sosial ekonomi di Prancis. Oleh sebab itu, Le Pen ingin melindungi Prancis dari pengaruh muslim yang dianggap mengancam, dan mengembalikan Prancis pada masa jayanya ketika di bawah kekuasaan Gereja Katolik dahulu. Berbeda dari Le Pen, Macron justru melihat *laïcité* sebagai pendukung kuat dalam mempertahankan identitas nasional Prancis. Adanya imigran yang berasal dari luar, terutama imigran muslim, bagi Macron merupakan sebuah jalan untuk memperkuat keberagaman dan identitas budaya di Prancis. Namun begitu, sekularisme yang ada pada *laïcité* tetap menjadi pegangan kuat Macron bahwa setiap individu bebas untuk memegang dan menjalankan aktivitas keagamaannya selagi masih dalam ruang lingkup privat dan mematuhi nilai-nilai yang ada pada *laïcité*.

Tulisan ini layak menjadi referensi bagi penulis untuk melihat bagaimana Emmanuel Macron bersikap terhadap *laïcité* yang menjadi wacana yang diangkat dalam Pemilu Prancis tahun 2017 lalu. Dengan adanya Le Pen sebagai subyek

---

<sup>23</sup> Aprilia Firmonasari, Wening Udasmoro, and Yohanes Tri Mastoyo, "Understanding Secularism and National Identity in French Political Discourses," *Jurnal Humaniora* 32, no. 2 (2020): 136-137.

pembandingan, tulisan ini membantu penulis dalam melihat bagaimana cara pandang Emmanuel Macron terhadap isu-isu yang dikaitkan dengan keberadaan imigran dan muslim di Prancis yang kemudian menjadi tanda tanya besar karena dirinya justru dikaitkan dengan isu islamofobia yang ada di Prancis pada masa pemerintahannya.

Ketiga, penulis merujuk pada tulisan yang berjudul *Effectiveness of the Application of Laïcité in the Life of Secularism in France to Minimize Religious Radicalization Groups* yang ditulis oleh Rezky Apriliantini, Visa Juliansyah, dan Rachma Putri. Tulisan ini menjelaskan bagaimana efektivitas dari penerapan *laïcité* dalam membendung kelompok radikal di Prancis. Tulisan ini melihat bagaimana sebelum Prancis menerapkan nilai-nilai sekularisme, Prancis yang pada awalnya masih di bawah pengaruh gereja dengan sistem pemerintahan monarki, sering dihadapkan dengan konflik agama yang terjadi antara penganut Katolik dengan penganut Protestan. Hal ini terjadi karena masih adanya nilai aristokrat<sup>24</sup> yang dipakai dalam pemerintahan monarki sehingga para pemegang kekuasaan yang berasal dari kerajaan berbeda, juga berada di sisi yang berbeda, baik di sisi Katolik ataupun Protestan.<sup>25</sup> Namun, pada periode terjadinya revolusi di Prancis sekitar tahun 1795 ketika pemerintahan dipegang oleh Direktori Prancis, mulailah diterapkan sistem separatisme dengan adanya pemisahan antara negara dan agama secara bertahap melalui sekularisasi pada institusi pemerintahan. Langkah Direktori Prancis terbilang berhasil karena sejak adanya sistem separatisme, Prancis berhasil menghentikan konflik berulang antara penganut Katolik dan Protestan. Kemudian

---

<sup>24</sup> Aristokrat adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mana hanya dipegang oleh para bangsawan yang berada di garis keturunan yang sama.

<sup>25</sup> Rezky Apriliantini, Visa Juliansyah, and Rachma Putri, "Effectiveness of Application of Laicite in Secularism Life in France To Minimize Religious," *Tanjungpura International Journal on Dynamics Economics, Social Sciences and Agribusiness* 2, no. 1 (2021): 21–30.

hal ini juga yang menjadi fondasi awal dari ditetapkannya undang-undang terkait *laïcité* atau sekularisme di Prancis pada tahun 1905 sebagai pilar penting pemerintah dalam memisahkan pengaruh agama dalam pemerintahan.

Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk dalam beragama. Akan tetapi, dijelaskan bahwa hal ini cukup memunculkan penolakan, terutama bagi kelompok separatis dan Islam radikal di Prancis dikarenakan adanya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan apa yang kelompok ini pegang, termasuk bagaimana media secara eksplisit dapat mengekspresikan pendapat mereka dan melakukan satire tentang agama sekalipun.

Tulisan ini layak menjadi referensi bagi penulis untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan *laïcité* yang dilihat dari dinamika perkembangannya sejak awal inisiasinya mulai terbentuk. Tulisan ini menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai *laïcité* cukup terhambat karena adanya penolakan dari kelompok separatis dan Islam radikal, bahkan menimbulkan tragedi yang menjurus pada aksi terorisme. Meskipun demikian, penerapan *laïcité* telah mendatangkan banyak keuntungan sejauh ini, terutama dalam melepas Prancis dari perang agama yang telah menelan banyak korban jiwa. Penolakan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan Islam radikal juga diminimalisir dengan membentuk Fondation de l'Islam de France sebagai organisasi yang mempunyai misi dalam mempromosikan nilai-nilai sekularisme dan dapat diandalkan dalam melawan radikalisme dan juga mempercepat integrasi para imigran muslim agar dapat memegang kewarganegaraan Prancis yang diberikan langsung oleh pemerintah.



Keempat, penulis merujuk pada tulisan yang berjudul *Dilema Negara Sekuler Prancis: Di Antara Tarikan Islamofobia dan Fundamentalisme Agama* yang ditulis oleh Muhammad Ridha Basri. Tulisan ini menjelaskan tentang dilema yang terjadi di Prancis sebagai negara sekuler yang berangkat dari trauma masa lalu ketika Pemerintahan Prancis dijalankan dengan sistem monarki yang dikuasai oleh kekuatan Gereja Katolik. Sejarah kelam yang dihiasi dengan pertumpahan darah akibat perang yang terjadi pada masa itu membuat Prancis mengambil langkah untuk melakukan revolusi. Revolusi dilakukan Prancis dengan menerapkan nilai-nilai sekularisme dalam pemerintahan yang diperkenalkan melalui *laïcité*. Tulisan ini kemudian menjelaskan bagaimana kehadiran *laïcité* yang bertujuan untuk melepas trauma terhadap kekuasaan kelompok religius, justru menimbulkan pertentangan antara mereka, warga Prancis itu sendiri. Pertentangan ini dijelaskan datang dari para fundamentalis yang dikenal sebagai kaum yang menolak keras kehadiran sekularisme, terutama di Prancis yang merupakan gambaran negara sekuler modern, dan di sisi lain terdapat kaum sayap kanan yang justru merupakan nasionalis-sekuler.<sup>26</sup>

Tulisan ini layak menjadi referensi bagi penulis untuk memahami kondisi internal Prancis sejak berevolusi menjadi negara sekuler modern dengan kehadiran *laïcité* sebagai dasar negara Prancis. Tulisan ini menemukan bahwa adanya pertentangan yang begitu jelas di antara warga Prancis itu sendiri. Kelahiran sekularisme di Prancis mendapat penolakan dari kubu sayap kiri ekstrem yang dikenal sebagai penganut fundamentalisme Islam. Mereka, para fundamentalis,

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridha Basri, "Dilema Negara Sekuler Prancis: Di Antara Tarikan Islamofobia dan Fundamentalisme Agama," *Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2022): 1–17.

menganggap bahwa nilai-nilai sekuler yang ada di Prancis tidak sesuai dengan apa yang dipegang dalam kepercayaan mereka, terutama terkait adanya pelarangan penggunaan atribut keagamaan oleh Pemerintah Prancis. Sebaliknya, kubu sayap kanan ekstrem atau yang dikenal sebagai nasionalis-sekuler, justru melihat kehadiran kaum fundamentalis Islam yang semakin mencolok sebagai tanda memudarnya nilai-nilai sekuler di Prancis yang dapat mengancam *laïcité* yang merupakan dasar negara mereka. Tulisan ini kemudian menjelaskan bahwa permasalahan kedua kubu ini cukup kompleks, dan dilema yang terjadi di Prancis merupakan akibat dari adanya bias dalam penerapan sekularisme di Prancis sehingga memunculkan fundamentalisme. Kaum fundamentalis Islam dilihat sebagai para imigran muslim yang datang dari negara dunia ketiga yang tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan sekuler di Prancis, sedangkan kaum nasionalis-sekuler dilihat sebagai kaum xenofobia yang takut terhadap kehadiran orang asing di antara kelompoknya yang dalam konteks ini adalah imigran muslim, termasuk para fundamentalis. Hal ini kemudian dilihat sebagai bentuk dilema persaingan antara keberadaan islamofobia dan fundamentalisme Islam di Prancis, dan sekularisme di Prancis dianggap belum bersifat universal dan mampu mempersamai kehadiran fundamentalisme Islam dengan masih adanya pertentangan terkait hal ini.

Kelima, penulis merujuk pada tulisan yang berjudul *The Efforts of President Emmanuel Macron in Making Islam de France* yang ditulis oleh Thahirah, Joko Marihandono, dan Danny Susanto. Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana usaha Emmanuel Macron dalam menerapkan konsep *Islam de France* di Prancis sebagai bentuk kampanyenya pada pemilu 2017. Pembahasan dalam tulisan ini

dimulai memperkenalkan bagaimana keberadaan populasi Islam di Prancis yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan populasi ini merupakan hal yang bagus, tetapi di satu sisi, hal ini justru menimbulkan rasa takut pada masyarakat Prancis dan Pemerintah Prancis sendiri. Ketakutan ini timbul dari mereka, kaum muslim yang menganggap bahwa nilai-nilai yang ada pada hukum agama lebih penting dibandingkan dengan hukum yang diterapkan di Prancis, yaitu *laïcité*. Pertentangan antara nilai-nilai yang dipegang oleh Islam dengan nilai-nilai kebebasan dalam sekularisme yang diterapkan di Prancis inilah yang menjadi hal yang dilihat sebagai sesuatu yang perlu dikontrol oleh Pemerintah Prancis.<sup>27</sup>

Tulisan ini kemudian menjelaskan langkah yang diambil Macron dalam mengontrol Islam agar tetap di bawah pengawasan pemerintah. Pemerintah Prancis berusaha untuk membuat Islam di Prancis agar terlepas dari pengaruh kelompok radikal yang membawa dogma yang dapat mengarahkan mereka pada aksi radikalisme dan terorisme. Selain itu, Macron juga berusaha untuk mengembalikan mispersepsi terhadap arti dari *laïcité* yang sering kali dianggap menentang kepentingan masyarakat dalam beragama. Kemudian dijelaskan pada tulisan ini bahwa Macron memiliki dua janji yang dibawa dalam kampanyenya pada pemilu 2017 lalu, yaitu membuat *Fédération nationale de l’Islam de France* yang berfokus pada pembiayaan pembangunan masjid-masjid di Prancis dan juga pemberian pelatihan dan edukasi dengan gelar sarjana kepada para imam agar mereka dapat memahami nilai-nilai republikan ada di Prancis sehingga dapat mengurangi radikalisme. Sayangnya rencana ini belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Janji

---

<sup>27</sup> Thahirah, Djoko Marihandono, and Danny Susanto, “The Efforts of President Emmanuel Macron in Making Islam de France,” *Atlantis Press* 593, no. Inusharts 2020 (2021): 296.

kedua dari Macron yaitu dengan menutup tempat beribadah dan perkumpulan sejenis yang bertentangan dengan nilai-nilai republikan dan menjerumuskan mereka kepada radikalisme dan terorisme. Hal ini kemudian diwujudkan Macron pada 2019 dengan dibuatnya hukum *La loi sur la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste* (loi SILT) yang mengatur tentang penutupan tempat beribadah dan sejenisnya yang terindikasi mengarahkan pada aksi diskriminasi, kebencian, radikalisme, dan terorisme. Kehadiran hukum ini memperlihatkan sedikit kemajuan dalam penerapannya karena Pemerintah Prancis berhasil menutup setidaknya 7 masjid yang terindikasi dan mengunjungi 93 rumah yang dicurigai masih berhubungan.

Tulisan ini layak menjadi referensi penulis dalam memahami bagaimana Macron dalam merencanakan dan membuat kebijakan, terutama terkait populasi Islam di Prancis yang menduduki posisi kedua agama dengan pemeluk terbanyak di Prancis. Tulisan ini menemukan bahwa Macron berusaha untuk membuat Islam di Prancis menjadi lebih baik dengan adanya regulasi yang dapat mengontrol mereka dari adanya radikalisme dan terorisme. Hal ini juga dilakukan agar citra Islam di Prancis dan Eropa yang sudah terlanjur buruk akibat aksi radikalisme dan terorisme dapat membaik kembali. Macron mencoba untuk memperkuat nilai-nilai republikan Prancis dengan keberadaan *laïcité* dan mengurangi dan membasmi jejak radikalisme di Prancis. Sayangnya, jurnal ini menemukan bahwa keberhasilan Macron dalam membuat hukum SILT mendapatkan pertentangan karena hukum ini tidak memiliki transparansi yang jelas terhadap hal apa yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum ini, dan hukuman apa yang seharusnya diberikan. Pada sisi lain, janji kampanye Macron terkait pembiayaan untuk masjid dan



pelatihan bagi para imam juga bertentangan dengan *laïcité* yang memisahkan antara pemerintahan dengan agama sehingga hal tersebut sangat perlu untuk dipertimbangkan kembali.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan hal penting yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam sebuah penelitian. Guna menganalisis permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep persepsi ancaman (*threat perception*). Konsep ini penting untuk menjawab pertanyaan penelitian pada penelitian ini.

### **1.7.1 Threat Perception**

Pengambilan sebuah keputusan tentunya membutuhkan pertimbangan yang panjang. Terlebih lagi apabila keputusan tersebut diambil oleh individu yang memiliki peran dan andil yang besar terhadap keputusan tersebut, tentunya hal ini akan bergantung terhadap persepsi atau cara pandang dari individu tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung terhadap suatu hal, dan juga proses seseorang mengetahui suatu hal melalui pancaindra. Janice Gross Stein dalam tulisannya mengartikan persepsi sebagai proses menafsirkan dan mengenali suatu hal melalui indrawi.<sup>28</sup> Sedangkan Daniel S. Papp dalam tulisannya mengartikan persepsi sebagai cara individu dalam melihat suatu hal yang berlandaskan pada pengalaman masa lalu,

---

<sup>28</sup> Janice Gross Stein, "Threat Perception in International Relations," in *The Oxford Handbook of Political Psychology*, 2nd ed., 2013, 2.

ekspektasi masa kini, ketakutan dan keinginan saat ini, dan pengaruh dari hal-hal lainnya.<sup>29</sup>

Janice Gross Stein kemudian hadir dengan melihat persepsi dari sisi lain, yaitu persepsi ancaman atau *threat perception*. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam konteks politik, ancaman diartikan sebuah usaha yang dilakukan secara konsepsional, baik melalui tindak politik ataupun kejahatan yang dapat membahayakan tatanan dan kepentingan negara dan bangsa. *Threat perception* sendiri merupakan kondisi yang dikonstruksi secara sosial oleh individu, baik dari aktor politik, para ahli, ataupun masyarakat dalam memersepsikan suatu hal sebagai sebuah ancaman.<sup>30</sup> Stein menggunakan kacamata rasionalis dalam melihat persepsi ancaman ini dengan memandang para pemimpin sebagai individu yang memegang peran penting dalam menentukan sikap negaranya, baik dalam bentuk kebijakan ataupun keputusan.<sup>31</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan Robert Jervis yang telah lebih dulu ada, bahwa tidak hanya aktor rasional seperti negara yang dapat membuat keputusan begitu saja, melainkan ada andil pemimpin sebagai individu yang memiliki persepsinya sendiri.<sup>32</sup> Persepsi ini dapat terbentuk dari pengamatan, pengalaman sebelumnya, pengaruh lingkungan internal pemerintahan, ataupun pengaruh eksternal seperti sistem internasional itu sendiri.<sup>33</sup> Dengan arti lain, dalam

---

<sup>29</sup> Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, 2nd ed. (New York: Macmillan Publishing Company, 1988), 155.

<sup>30</sup> Christoph O. Meyer, "International Terrorism as a Force of Homogenization? A Constructivist Approach to Understanding Cross-National Threat Perceptions and Responses," *Cambridge Review of International Affairs* 22, no. 4 (2009): 648.

<sup>31</sup> Stein, "Threat Perception in International Relations.", 3.

<sup>32</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, Princeton University Press, 2017.

<sup>33</sup> Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*.

tulisannya ini Stein menjelaskan bahwa ancaman tidak hanya dapat terbentuk dan bersumber dari negara, tetapi juga bisa dari individu, kelompok, dan aktor lainnya.

Stein kemudian menjelaskan bahwa terdapat dua jenis ancaman, yaitu ancaman verbal dan non-verbal (fisik).<sup>34</sup> Ancaman verbal dapat berupa pernyataan yang ditujukan untuk memperlihatkan niat dari pemberi ancaman. Sedangkan ancaman non-verbal lebih beragam. Ancaman non-verbal dilakukan dengan menunjukkan keseriusan pemberi ancaman bahwa terdapat konsekuensi apabila keinginan, kepentingan, ataupun tuntutannya tidak dipenuhi. Lebih lanjut, Stein menjelaskan bahwa pemaknaan ‘ancaman’ sebagai sebuah ancaman tidak dapat diartikan secara bersama, atau dengan kata lain, ancaman dimaknai sesuai dengan persepsi dari target ancaman tersebut.<sup>35</sup> Dalam hal ini, Stein menjelaskan bahwa persepsi ancaman dapat berbentuk verbal dan non-verbal, dan kedua hal tersebut bergantung pada interpretasi dari penerima ancaman. Berdasarkan tulisan Stein pada bab “Nonpsychological Explanations of Threat Perception” dalam bukunya *Threat Perception in International Relations*, ia memaparkan sekumpulan variabel yang dapat membentuk persepsi ancaman, yaitu:<sup>36</sup>

1) *Changes in the Distribution of Capabilities*

Terjadinya perubahan dalam distribusi kekuasaan membuat tidak adanya *balance of power*. *Balance of power* hadir untuk menciptakan keseimbangan di dalam sebuah sistem agar tidak ada kekuatan yang terlalu kuat dibandingkan kekuatan lain. Kondisi ini dapat memicu terbentuknya persepsi ancaman seorang pemimpin karena adanya

---

<sup>34</sup> Janice Gross Stein, “Threat Perception in International Relations,” 2.

<sup>35</sup> Janice Gross Stein, “Threat Perception in International Relations,” 2.

<sup>36</sup> Janice Gross Stein, “Threat Perception in International Relations,” 3-6.

ketakutan bahwa kekuatan yang berkuasa akan menantang kekuatan lainnya yang lebih lemah.

2) *Status Dilemma*

Kondisi ini biasanya terjadi pada pemimpin yang memomorsatkan keamanan. *Status dilemma* tidak akan terjadi apabila kedua pemimpin saling mengetahui posisi dan status satu sama lain. Namun, apabila terdapat ketidakjelasan posisi dan status dari negaranya terhadap negara lain, hal ini akan memunculkan kebingungan seorang pemimpin sehingga pemimpin akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman, meskipun pada kondisi sebenarnya tidak demikian. Pada akhirnya, para pemimpin akan mengambil tindakan yang bertujuan untuk memperjelas posisi mereka, dan tindakan ini pula yang dapat dinilai pemimpin lainnya sebagai ancaman.

3) *Structural Attributes of Political System*

Organisasi dan birokrasi politik dapat mempengaruhi para pemimpin untuk mencari cara dalam menghadapi masalah dengan memprioritaskan kepentingannya dan institusinya dalam lingkup domestik. Pada variabel ini, pemimpin akan mengikuti lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya ancaman berdasarkan informasi yang telah didapatkan secara kolektif di lapangan. Kelengkapan informasi tersebut kemudian menjadi tolak ukur bagi lembaga untuk menentukan tingkatan ancaman, apakah itu dinilai sebagai ancaman yang serius atau tidak. Semuanya dilakukan dengan



mengutamakan kepentingan institusi sehingga cenderung membuat persepsi ancaman dipandang tidak adil dan remeh (bernilai rendah).

#### 4) *Sociocultural*

Lingkungan masyarakat dan identitas yang telah melekat di dalam lingkungan tersebut mempengaruhi bagaimana pemimpin memandang sebuah ancaman. Identitas yang telah mengakar dapat menjadi pertimbangan penilaian yang cukup kuat bahkan pertimbangan lainnya dapat dianggap tidak begitu penting. Ancaman yang telah terjadi secara berulang pendapat membentuk adanya persepsi ancaman kolektif yang dapat bertahan dari waktu ke waktu. Dengan begitu, ancaman tersebut akan dinilai sebagai persepsi ancaman bersama yang dapat mempengaruhi pemimpin dalam bertindak. Pada sisi lain, budaya politik yang ada juga memainkan peran penting. Budaya politik berkaitan dengan sikap, keyakinan, serta nilai-nilai yang di percayai oleh individu di dalam lingkungan masyarakat tentang sistem politik negaranya.<sup>37</sup> Selain itu, sejarah politik suatu negara yang telah terbentuk dan mengakar sejak dulu juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan budaya politik.<sup>38</sup> Hal ini membuat budaya politik yang telah berkembang dapat mempengaruhi persepsi ancaman dari seorang pemimpin.

#### 5) *Breaking of Norms*

---

<sup>37</sup> Gabriel Abraham Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton University Press, 1963).

<sup>38</sup> Kacung Marijan, "The Study of Political Culture in Indonesia," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 12, no. 2 (1999): 57–66., 59.

Pelanggaran norma yang terjadi dapat dianggap sebagai sinyal kritis yang pada akhirnya membentuk dan meningkatkan persepsi ancaman dari seorang pemimpin. Norma terbentuk dari kesepakatan bersama, baik dalam bentuk budaya ataupun aturan resmi. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang melampaui batas di mana norma itu berlaku, maka hal tersebut dapat membentuk persepsi ancaman bersama bagi pemimpin ataupun masyarakat di mana norma tersebut berlaku. Semakin parah norma itu dilanggar, maka akan semakin tinggi juga persepsi ancaman yang terbentuk.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas terkait konsep *threat perception* oleh Stein, terlihat jelas bagaimana kemungkinan sebuah persepsi ancaman dapat terbentuk dari sekumpulan variabel yang dapat kita analisis kembali dari keputusan atau tindakan seorang pemimpin. Variabel-variabel ini kemudian dijelaskan Stein sebagai variabel yang terpisah (tidak berhubungan) dan berbeda satu sama lain dari proses pembentukannya.<sup>39</sup> Penulis akan menggunakan variabel-variabel tersebut untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dan tindakan dari Emmanuel Macron. Dengan demikian, konsep *threat perception* dari Janice Gross Stein ini akan penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana persepsi ancaman Emmanuel Macron terhadap muslim di Prancis tahun 2017-2022.

---

<sup>39</sup> Stein, "Threat Perception in International Relations.", 6.

## 1.8 Metode Penelitian

Metodologi merupakan aspek penting dalam penelitian hubungan internasional yang digunakan sebagai sebuah prosedur untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena yang sedang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh secara kuantitatif atau pengukuran.<sup>41</sup> Dengan kata lain, penelitian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena sosial dan penemuan yang ada secara sistematis, faktual, dan aktual.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti dengan cara yang dapat dipahami dengan baik dengan menggunakan konsep yang relevan dengan fenomena yang diteliti.<sup>42</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait isu yang dikaji dengan melihat tindakan, perilaku, dan ucapan dari pembuat kebijakan. Penulis memilih penelitian ini agar dapat menjelaskan bagaimana persepsi ancaman Emmanuel Macron terhadap muslim di Prancis pada tahun 2017-2022.

---

<sup>40</sup> Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," 1990, 3.

<sup>41</sup> Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research*, Sage Publication, 1990, 10-11.

<sup>42</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative Adn Mixed Methods Approaches*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5th ed., vol. 53 (SAGE Publications, Inc, 2018), 162.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam memastikan penelitian tetap berada pada fokusnya dan sesuai dengan batasan yang telah penulis tetapkan, penulis telah menetapkan batasan bagi penelitian ini adalah antara periode tahun 2017-2022. Periode waktu ini dipilih karena periode ini merupakan rentang masa jabatan Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis pada periode pertama. Pada periode ini pula terjadi beberapa insiden, termasuk insiden terbunuhnya Samuel Paty yang membuat Macron mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang membuat munculnya indikasi adanya persepsi ancaman Macron terhadap muslim di Prancis.

### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit yang perilakunya akan dianalisis, dijelaskan, dan diramalkan.<sup>43</sup> Unit analisis juga dapat disebut sebagai variabel dependen.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Emmanuel Macron. Sedangkan di sisi lain terdapat unit eksplanasi, yaitu unit mempengaruhi unit analisis, atau dapat disebut sebagai variabel independen.<sup>45</sup> Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah muslim di Prancis. Selanjutnya adalah tingkat atau level analisis. Tingkat analisis sendiri diperlukan untuk memfokuskan penelitian pada tingkat yang mana sebuah fenomena berada.<sup>46</sup> Tingkat analisis pada penelitian ini adalah individu. Kemudian, hubungan antara kedua unit adalah induksionis karena unit analisis berada pada tingkat individu, sedangkan unit eksplanasi berada pada tingkat negara-bangsa.

---

<sup>43</sup> Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," , 39.

<sup>44</sup> Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," , 39.

<sup>45</sup> Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," , 39.

<sup>46</sup> Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," , 43.



#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*) yang mana penulis akan menggunakan jenis atau sumber data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, dokumen, dan situs web. Dalam penelitian ini, sumber rujukan utama yang akan penulis gunakan adalah buku biografi dengan judul *The French Exception: Emmanuel Macron - The Extraordinary Rise and Risk*. Buku dengan judul *Threat Perception in International Relations*. Jurnal ilmiah yang berjudul *Constructions and uses of laïcité (French secularism) in French public discourses, Understanding Secularism and National Identity in French Political Discourses, Effectiveness of the Application of Laïcité in the Life of Secularism in France to Minimize Religious Radicalization Groups, Dilema Negara Sekuler Prancis: Di Antara Tarikan Islamofobia dan Fundamentalisme Agama, The Efforts of President Emmanuel Macron in Making Islam de France, Islamophobia in the West and Post 9/11 Era, Defining and Researching Islamophobia, The European Extreme-Right and Islam: New Directions?, dan Indivisibilité, Sécurité, Laïcité: The French Ban on the Burqa and the Niqab, French Politics*. Portal berita resmi seperti France 24, POLITICO, BBC NEWS, CNN, The Diplomat, New York Times, Foreign Policy, dan Washington Post. Terakhir, situs web pendukung seperti Britannica, HISTORY, BIOGRAPHY, dan La République En Marche!.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga tahapan analisis data yang dijelaskan oleh Matthew Miles dan Michael Hubberman:<sup>47</sup>

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi data, memfokuskan data, menyederhanakan data, mengabstraksi data, dan menjadikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi kesatuan data yang utuh. Pada penelitian ini, penulis akan membagi fokus penelitian dengan beberapa kata kunci, yaitu pengalaman hidup Emmanuel Macron yang lahir di Amiens (sebelah utara Prancis), *laïcité* atau sekularisme di Prancis, masuk dan berkembangnya Islam di Prancis, respons Macron terhadap insiden terorisme di Prancis dengan pembuatan Anti-Separatism Bill. Beberapa kata kunci ini akan dikaitkan satu sama lain dan digunakan untuk mempermudah penulis dalam menemukan data yang relevan.

#### 2) Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar data yang telah diperoleh yang berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian pada akhirnya dapat ditarik menjadi kesimpulan. Setelah melakukan reduksi data, hasil dari proses tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk uraian dengan beberapa kata kunci yang telah disebutkan dalam tahap reduksi data.

#### 3) Penarikan Kesimpulan

---

<sup>47</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publication, 2nd ed. (SAGE Publications, Inc, 1994), 10.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang sebelumnya telah disajikan, dan memastikan bahwa pertanyaan penelitian telah terjawab dalam penelitian ini.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, kerangka konseptual, jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data.

### **BAB II DINAMIKA PERKEMBANGAN ISLAM DI PRANCIS**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah awal masuknya Islam di Prancis, dan bagaimana Islam dapat berkembang dan bertahan sampai saat ini di sebuah negara sekuler.

### **BAB III PERJALANAN HIDUP EMMANUEL MACRON**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perjalanan hidup atau biografi singkat dari seorang Emmanuel Macron hingga pada akhirnya ia menjadi Presiden Prancis

### **BAB IV ANALISIS PERSEPSI ANCAMAN EMMANUEL MACRON TERHADAP MUSLIM DI PRANCIS**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan persepsi ancaman Emmanuel Macron dengan menggunakan konsep *threat perception* oleh Janice Gross Stein dalam bukunya yang berjudul *Threat Perception in International Relations*.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang akan berisikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini.

